

## **EVALUASI KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BENGKULU DALAM PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEBANGSAAN**

Oleh:

**Alexsander<sup>1</sup>, Risa Stevani<sup>1</sup>, Henny Aprianty<sup>1</sup>, Hernowo Noviyanto<sup>2</sup>**

**Email Korespondensi : [henny@unihaz.ac.id](mailto:henny@unihaz.ac.id)**

<sup>1</sup>) Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

<sup>2</sup>) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini dijalankan bertujuan untuk menilai dasar Badan Perpaduan Nasional dan Politik Provinsi Bengkulu dalam usaha memperkuat perpaduan dan perpaduan nasional. Kaedah kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif. Data dalam penyelidikan ini diperoleh daripada Sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan prosedur inferensi/validasi. Hasil kajian menunjukkan bahawa: 1) Dasar Badan Perpaduan Nasional dan Politik Provinsi Bengkulu dalam memperkuat perpaduan dan integriti nasional telah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab, ini dapat dilihat daripada hasil kajian yang berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada informan. 2) Penilaian terhadap kebijakan Badan Nasional dan Politik Provinsi Bengkulu dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa telah berjalan dengan baik, sesuai dengan indikator kebijakan publik yang meliputi: a) Indikator Input, b) Indikator Proses, c) Indikator Output, dan d) Penunjuk Hasil. 3) Para pegawai juga telah berusaha sedaya upaya untuk terus meningkatkan dasar Badan Perpaduan Nasional dan Politik Provinsi Bengkulu dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

**Kata kunci: Evaluasi; Kebijakan; Pemantapan Kebangsaan.**

### **Abstract**

*This investigation was carried out with the aim of assessing the basis of the Bengkulu Province National and Political Unity Agency in its efforts to strengthen national integration and integration. The study method used is a qualitative study. The data in this investigation was obtained from primary and secondary sources. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and inference/validation procedures. The results of the study show that: 1) The basis of the Bengkulu Province National and Political Unity Agency in strengthening national unity and integrity has been implemented well and responsibly, this can be seen from the results of the study which is based on information obtained from informants. 2) Assessment of the policies of the Bengkulu Province National and Political Agency in strengthening national unity and integrity has gone well, in accordance with public policy indicators which include: a) Input Indicators, b) Process Indicators, c) Output Indicators, and d) Result Indicators. 3) The employees have also tried their best to continue to improve the basis of the Bengkulu Province National and Political Unity Agency in strengthening national unity and unity.*

**Key Words : Evaluation; Policy; National Strengthening.**

**A. Pendahuluan**

Sepuluh tahun lepas, dinamik kehidupan sosial, Negara dan provinsi di Indonesia, telah menunjukkan perubahan yang sangat mendasar yang patut mendapat perhatian, dari seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara. Dunia yang tidak berhenti akan menantang solidaritas dan integritas wilayah masyarakat.

Wawasan kebangsaan adalah pemahaman tentang bagaimana sebuah negara menggunakan keadaan geografis, keamanannya untuk tujuan dan kepentingannya sendiri. Bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan negara lain dan dengan negara lain di seluruh dunia ditentukan oleh wawasan kebangsaannya dapat juga diartikan sebagai jati diri bangsa, suatu Perspektif atau visi berkaitan dengan kemampuan memahami keberadaan manusia sebagai suatu bangsa dalam pemikiran dan tindakan individu atau kelompok, termasuk pengetahuan saat ini dan masa depan (Alhogbi et al., 2018). Tantangan masa depan dan keanekaragaman pulau ini. Oleh karena itu, pendidikan nasional juga ia boleh ditafsirkan sebagai pendekatan atau perspektif yang melibatkan kesedaran seseorang atau kumpulan kehidupan identitas bangsanya ia bekerja berdasarkan gagasan bumi tentang kehidupan dalam beberapa cara. Persekitaran dalaman dan luaran (Dodi, 2019)

Oleh karena itu, dalam konteks NKRI, kesadaran nasional adalah bagaimana masyarakat indonesia melihat diri dan persekitaran mereka untuk mencapai matlamat negara. Ini termasuk pengiktirafan negara sebagai entiti Politik, ekonomi,

sosial, budaya dan keamanan berdasarkan Pancasila 1945. Artinya negara dianggap sebagai negara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Menurut (Pratama & Najicha, 2022) Peningkatan kesadaran juga merupakan langkah penting untuk memperkuat Kekuatan nasional semua negara, termasuk Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, selain memperkuat situasi politik dan ekonomi, kesadaran nasional harus dihidupkan kembali melalui program ideologi dan sosial. Untuk mencapai hal ini, strategi integrasi nasional yang didasarkan pada hubungan nasional yang kuat adalah alat utama. Pada saat yang sama, negara tersebut menjadi negara berdasarkan agama dan terus melakukan perlawanan, terkadang dengan kekerasan.

Banyak faktor, termasuk krisis ekonomi yang terjadi di akhir era Orde Baru, dinamika global, menyebabkan gagal mencapai kemandirian kesejahteraan rakyat kelas bawah. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan nasional sangat penting. Jika Indonesia ingin tetap hidup dan tumbuh Kepada orang-orang yang mulia, persatuan, keadilan.

Menurut (Bambang Darmono, 2016) Sistem keamanan nasional harus didasarkan pada hal tersebut doktrin dan filsafat kebangsaan selain mengikuti perkembangan ancaman di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tidak ada satu pun dari perkembangan seperti globalisasi, teknologi informasi, dan demokratisasi yang dapat mengubah nilai dasar Kita sebagai umat Oleh karena itu, sistem

keamanan nasional kita tidak ditentukan oleh kekuatan dan ancaman dari luar, melainkan oleh sistem nilai-nilai nasional, identitas diri, nasionalisme dan gagasan.

Kebangsaan, serta pengaruh dunia dan pemikiran Ada dunia berbeda. Oleh karena itu, kita harus fokus pada hal ini. menggalakkan pegangan dan idea negara untuk melahirkan idea dan program baru yang memenuhi keperluan sistem keselamatan negara. Menurut (Istianto, 2011) Dalam sistem demokrasi, sistem keselamatan negara sangatlah penting dibangun dari konsep hingga operasional secara profesional, efisien dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan kerja dan kinerja badan keamanan nasional, kita dapat menjamin Perlindungan warga negara, termasuk kedaulatan, integritas wilayah, keamanan dalam negeri, dan penegakan hukum. Meskipun dukungan terhadap aspek ekonomi dan sosial dari sistem keamanan nasional masih kurang, kemajuan suatu negara, termasuk situasi keamanan nasionalnya, bergantung pada pentingnya perubahan pemikiran (Firman Gani et al., 2021). Dalam konteks yang lebih luas, lambatnya konsolidasi demokrasi dan keamanan nasional disebabkan oleh kurangnya beberapa hal, seperti kebebasan dan aktifnya masyarakat sipil, kebebasan dan otonomi masyarakat politik, ketaatan dan patuhnya tokoh politik utama terhadap aturan hukum, dukungan birokrasi Menentang pemerintahan demokratis dan sistem ekonomi dan sosialnya (Rajab, 2022). Dengan menggunakan kapasitas nasional yang tepat, kita dapat menciptakan

strategi keamanan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam tata kelola keamanan nasional.

Kantor Kesatuan Politik Nasional Provinsi (Kesbangpol) Bengkulu berperan penting dalam penanganan konflik komunal dan regional di wilayah tersebut. Kesbangpol Provinsi Bengkulu Undang-Undang Provinsi Bengkulu Hal ini akibat perubahan Undang-Undang Provinsi Bengkulu Nomor 27 Tahun 2011 yang sebelumnya terdiri dari Direktur Kantor Wilayah Sosial Politik dan Perlindungan Sipil. Kesbangpol Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari Pemerintah Negara Bengkulu bertindak sebagai mediator kolaborator untuk memajukan persatuan bangsa dan pergerakan politik. Misi utama Kesbangpol adalah mendukung Gubernur Bengkulu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi Bengkulu.

Program pembangunan nasional merupakan bagian dari integrasi organisasi politik nasional dan daerah Bengkulu yang memiliki tugas utama merumuskan kebijakan memfasilitasi pelaksanaan pemantapan kebangsaan. Selain itu, Bidang Pemantapan Kebangsaan juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran serta melakukan persiapan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya bangsa berdasarkan Undang-Undang 1945. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang pemantapan kebangsaan tahun 2023 adalah Mendorong penciptaan dan

pelaksanaan kebijakan teknis dalam konteks falsafah dan umat Pancasila. Bekerja ini akan dilaksanakan Bengkulu dengan sasaran utama adalah aparatur pemerintah dan masyarakat. Matlamat aktiviti ini adalah untuk meningkatkan karakter masyarakat atau aparatur negara berdasarkan ideologi Pancasila.

Berdasarkan penjelasan Seperti di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul berikut. "Evaluasi Persatuan Bangsa & Implementasi Kebijakan Politik di Provinsi Bengkulu Mempertahankan Kebangsaan."

Setelah melihat Penjelasan mengenai permasalahan tersebut di atas, peneliti menemukan permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu: Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap kebijakan bidang pemantapan kebangsaan Acara ini diselenggarakan oleh Persatuan Nasional dan Lembaga Politik Provinsi Bengkulu. dalam pelaksanaan Wawasan Kebangsaan?

### **B. Metode Penelitian**

Jenis kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kualitatif deskriptif (Creswell dalam (Purnawan, 2020)). Penyelidikan itu menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang berupaya menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa" (Purnawan et al., 2022). (Jonathan Sarwono, 2006) menurut kualitatif penelitian adalah suatu proses, cerdas, kompleks, interaksi dengan orang-orang. Di sisi lain, penelitian studi kasus kualitatif berfokus pada topik tertentu dan menetapkannya sebagai sebuah pemangku kepentingan. Dengan kata

lain, kajian ini dikumpul daripada pelbagai sumber (Hadari Nawawi, 1991). Untuk melakukan penelitian yang mendalam maka fokus penelitian ini adalah informasi keadaan partisipasi (Creswell, 2013) nasional dan lembaga politik Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi pelaksanaan penguatan pemerintahan.

Menurut (Sugiyono, 2016) Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data Sebagai Berikut:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Maka yang menjadi informan dalam penelitian tesis ini ada 7 orang, mereka ialah Kepala Badan Kesbangpol Povinsi Bengkulu, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Kabid Bidang Pemantapan Kebangsaan, Kepala Sub. Bidang Pemantapan, Penyusunan Program Pembinaan Lingkungan Budaya pada Bidang Pemantapan Kebangsaan, Analis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Pemantapan Kebangsaan, dan yang terakhir Pengaministrasi Umum Bidang Pemantapan Kebangsaan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

#### **Hasil Evaluasi Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu dalam Pelaksanaan Pemantapan Kebangsaan**

Dari analisis berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terhadap evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi

Bengkulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dalam pelaksanaan stabilisasi nasional: Kemudian, evaluasi persatuan dan kesatuan nasional lembaga politik. di provinsi Bengkulu. kebijakan lembaga dalam melaksanakan stabilisasi nasional telah berakhir baik, sesuai dengan indikator-indikator kebijakan publik yang meliputi:

1. Indikator Input, Dengan kesatuan nasional dan lembaga politik Provinsi Bengkulu sudah terdapat sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang berkualitas mumpuni dalam menjalankan pekerjaan dan tugas, fasilitas yang nyaman dan lengkap agar menciptakan suasana kerja yang baik, peralatan komunikasi seperti komputer dan telepon serta peralatan supaya jaringan internet lancar seperti Wifi, alat-alat tulis kelengkapan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bisa berupa transportasi jika ada tugas di lapangan
2. Indikator Process, Efektivitas dan efisiensi kebijakan publik dan politik di provinsi Bengkulu secara terpadu, dapat melalui sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, serta melalui tingkah laku dan perilaku yang menunjukkan kesopanan santunan yang sesuai dengan norma dan agama.
3. Indikator Outputs, adanya berbagai kegiatan Badan Kesatuan Negara dan Politik Provinsi Bengkulu. dalam menetapkan kebijakan publik, masyarakat dapat damai dan tentram, toleransi, dan harga-menghargai antar etnis/suku

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga Masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran tentang pentingnya hidup rukun dan damai, dan toleransi antar umat beragama, hal ini melalui sosialisai.

4. Indikator Outcomes, ada banyak dampak positif yang diterima Masyarakat, diantaranya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. untuk perlindungan hak asasi manusia. menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. melaksanakan kesejahteraan sosial.

### **Pembahasan**

Berdasarkan data dan sumber wawancara sebelumnya, subbab ini akan menjelaskan lebih lanjut data yang dikumpulkan di atas berdasarkan konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan.

### **Evaluasi Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu dalam Pelaksanaan Pemantapan Kebangsaan**

Pembentukan Persatuan Bangsa dan Partai Politik Daerah Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Tahun Juni 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bengkulu Tahun 8 Agustus 2008 tentang Kepengurusan dan Tata Usaha di Bidang Inspeksi , rencana pembangunan daerah. Institusi teknis daerah.

Undang-Undang Daerah Bengkulu ini merupakan hasil penggabungan Departemen Politik dengan Departemen Politik dan

Markas Besar Daerah yang mengubah Undang-Undang Daerah No. 27 Maret 2001. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu merupakan salah satu unsur pendukung pemerintahan daerah Bengkulu dan berperan sebagai fasilitator, mediator dan kontributor dalam memajukan kesatuan kekuatan nasional dan politik melalui peran sentralnya dalam perumusan dan penerapannya. kebijakan daerah untuk mendukung Bengkulu. Gubernur Politik, khususnya di bidang integrasi nasional dan politik.

Menurut Bridgman dan Davis (2000), ukuran evaluasi kebijakan publik mempunyai empat indikator utama: (1) indikator masukan, (2) indikator proses, (3) indikator keluaran, dan (4) tanda keluaran. Uraianya adalah sebagai berikut:

### **Indikator Input**

Aspek Keterlibatan ini akan fokus pada penilaian apakah dukungan dan sumber daya dasar diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Indikator-indikator ini dapat mencakup struktur pendukung manusia, keuangan atau lainnya.

Untuk memahami lebih lanjut tentang Peneliti bertanya kepada informan mengenai dukungan sumber daya dasar dan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan keberlanjutan nasional. Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa banyak bahan pendukung dan data dasar, termasuk kebutuhan manusia berkualitas dan mumpuni dalam menjalankan pekerjaan dan tugas, fasilitas yang nyaman dan lengkap agar menciptakan suasana kerja yang baik, peralatan komunikasi seperti

komputer dan telepon serta peralatan supaya jaringan internet lancar seperti Wifi, alat-alat tulis kelengkapan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bisa berupa transportasi jika ada tugas di lapangan.

Penggabungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Daerah Provinsi Bengkulu No. 11 pendukung Pekerjaan gubernur diarahkan oleh kepala suku. Kelompok ini melapor kepada menteri daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemantapan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

### **Tugas Pokok**

Merumuskan kebijakan dan mendorong terselenggaranya pembangunan nasional.

### **Fungsi**

- 1) Peningkatan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sosialisasi kesadaran nasional dan penguatan pendidikan nasional.
- 2) Menjamin perumusan kebijakan, mendorong pelaksanaan kerjasama dan memperkuat pengawasan nasional.
- 3) Menetapkan kebijakan dan mendorong pelaksanaan integrasi
- 4) Menetapkan kebijakan dan mendorong pelaksanaan pembangunan kebudayaan nasional
- 5) Menetapkan kebijakan dan mendorong pelaksanaan undang-undang tahun 19456. Tempat penguatan pulau.

**Bidang Pementapan****Kebangsaan Terdiri dari :**

- 1) Direktur Wawasan Kebangsaan dan Wakil Direktur Wawasan Kebangsaan mengoordinasikan perumusan kebijakan dan mengelola pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh otoritas.
- 2) Kepala unit nasional terpadu dan sistem nasional menyelenggarakan perumusan kebijakan, dan kepala unit nasional menyelenggarakan kaitan perumusan program, melaksanakan integrasi dengan kebudayaan nasional, mengembangkan kebudayaan nasional dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Lainnya.

Kemudian perlu juga untuk mengetahui berapa Peneliti menanyakan kepada informan mengenai sumber daya manusia (resources), keuangan dan struktur pendukung lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan jawaban jurnalis, HR dapat mengambil keputusan diperlukan sekurang-kurangnya sebanyak 8 orang, dana penunjang yang dibutuhkan sekitar lebih dari 66 juta dan harus pula dilengkapi dengan infrastruktur yang baik dan juga lengkap supaya dapat memaksimalkan hasil pekerjaan yang di berikan.

Kesuksesan tentu saja membutuhkan struktur yang kuat dan kokoh. Kita sering mendengar hal ini

dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika mendengar kata infrastruktur, hal pertama yang terlintas di benak Anda adalah yang berkaitan dengan bangunan, fasilitas, dan pembangunan.

Infrastruktur memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Memiliki infrastruktur yang tepat adalah kuncinya. Bahan dan struktur, apapun bentuk fisiknya, disebut struktur, yang merupakan komponen penting. Gedung Biro Politik Persatuan Provinsi Bengkulu dalam kondisi baik, diperlukan mencakup berbagai hal, diantaranya: lingkungan dan bangunan yang nyaman, kebutuhan internet dan telpon, alat-alat elektronik penunjang seperti tv, laptop/computer, telpon kantor, infokus, dll, ATK, dan lainnya.

**Indikator Process**

Aspek *Proses* ini berfokus pada evaluasi bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi layanan yang tepat bagi masyarakat. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan publik.

Untuk memahami lebih lanjut Peneliti meminta informasi mengenai penjabaran kebijakan menjadi pelayanan yang tepat bagi masyarakat. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa ada banyak cara untuk mengubah kebijakan agar dapat melayani masyarakat dengan lebih efektif, diantaranya menyadarkan Masyarakat betapa pentingnya rasa kebangsaan dan hidup damai ditengah-tengah masyarakat, dapat saling harga-mengargai antar etnis, dan suku

bangsa, serta dapat menciptakan harmonisasi di tengah-tengah Masyarakat, pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran tentang pentingnya hidup rukun dan damai, dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Aktivitas sosialisasi sering dilaksanakan oleh pihak kesbangpol supaya Masyarakat paham dan mengerti tentang wawasan kebangsaan. Salah satu materi yang sering menjadi materi dalam sosialisasi yaitu tentang Kita harus terus menumbuhkan kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sejak dini untuk memahami dan menanamkan empat pilar negara dalam kehidupan sehari-hari. Tentang menumbuhkan rasa cinta tanah air yang merupakan permata utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar yang dimaksud adalah bagaimana kita memahami Pancasila, pemahaman kita terhadap UUD 1945, pemahaman kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan, sejahtera, dan bersatu.

Selanjutnya dalam indikator proses perlu juga untuk mengetahui bagaimana Peneliti menanyakan kepada responden mengenai efektivitas dan efisiensi metode/metode yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan publik. Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa cara/metode yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut sangat efektif dan efisien, dapat melalui

sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, serta melalui tingkah laku dan prilaku yang menunjukkan kesopanan santunan yang sesuai dengan norma dan agama.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa cara mentransformasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi langsung kepada anak-anak sekolah, bahwa pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran tentang pentingnya hidup rukun dan damai, dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. masalah ini. adalah salah satu solusi agar tercapainya efisiensi dan efektivitas dari sosialisai-sosialisasi yang dilakukan oleh kesbangpol,

### **Indikator Outputs**

Aspek *Outcome* (hasil) menitikberatkan pada evaluasi terhadap hasil atau outcome yang dihasilkan dari suatu sistem atau proses kebijakan publik. Misalnya, ukuran hasil ini menunjukkan berapa banyak orang yang berhasil berpartisipasi dalam suatu proyek.

Dalam hal ini perlu diketahui secara pasti apa akibat/akibat dari kebijakan publik tersebut, sehingga peneliti akan bertanya kepada informan. Tanggapan para informan menunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga politik di Negara Bagian Bengkulu dalam menetapkan kebijakan publik, masyarakat dapat damai dan tentram, toleransi, dan harga-menghargai antar etnis/suku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga Masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara,



mempunyai kesadaran tentang pentingnya hidup rukun dan damai, dan toleransi antar umat beragama, hal ini melalui sosialisai.

Kemudian berlanjut dari Apa outcome/hasil dari kebijakan publik Selain itu, karena perlu diketahui berapa banyak orang yang berhasil berpartisipasi dalam program/proyek, peneliti akan mengajukan pertanyaan deskriptif. Dari tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang berhasil mengikuti program/kebijakan adalah tahap seleksi pertama sudah lumayan meningkat, ada lebih dari 50 orang untuk data terbarunya.

Ikatan kebangsaan senantiasa digalakkan dan dikuatkan untuk menjaga persatuan, kesatuan, solidaritas dan saling menghormati, untuk mencapai keselarasan, keseimbangan, dan kedamaian dalam segala aspek kehidupan. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan nasional, perlu diperjelas nilai-nilai yang terkandung dalam empat perjanjian pokok tersebut. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 berupaya memulihkan jati diri bangsa dan memperkuat pemahaman sistem nasional.

Hal tersebut sesuai dengan materi salah satu sosialisai yang diadakan oleh kesbangpol yaitu “Memperkuat kesadaran nasional bernegara dan kehidupan berbangsa”. Menurut Mendagri, falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan banyak wilayah dan pulau-pulau yang tersebar dengan beragam budaya, ras, adat istiadat,

dan kepercayaan, dengan tujuan utama menjadi bangsa yang mandiri. Untuk memupuk rasa cinta terhadap NKRI, seluruh warga negara harus mengedepankan sikap saling menghormati perbedaan yang ada.

Tumbuhnya kesadaran akan keberagaman sosial dan budaya sebagai ciri budaya Indonesia semakin kuat dan adanya kemampuan untuk menciptakan identitas pribadi berdasarkan pengakuan akan nilai keberagaman yang kita miliki. Oleh karena itu, tindakan khusus diharapkan dapat diambil untuk menjaga keanekaragaman jenis ini.

Sementara, Kepala Seksi Bina Ideologi Kesbangpol mengatakan, tujuan kegiatan seminar tersebut, menanamkan cinta tanah air melalui sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Ia juga menambahkan kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut diadakan 14 kali dalam setahun di kecamatan dan sekolah-sekolah. Kegiatan diikuti staf ASN di provinsi Bengkulu.

### **Indikator Outcomes**

Aspek hasil (dampak) berfokus pada pertanyaan mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat atau unit yang lebih luas. Indikator kinerja merupakan gambaran hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, peningkatan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efisiensi, dan peningkatan pendapatan).

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui pengaruh masyarakat luas atau partai politik yang terkena dampak kebijakan tersebut, sehingga peneliti mengajukan pertanyaan

kepada informan. Dari jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa pengaruh masyarakat luas atau partai politik diwujudkan dalam bentuk kehidupan masyarakat miskin nyaman, damai, dan tentram, menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya sangat perlu untuk mengetahui berapa banyak dampak positif yang dihasilkan, peneliti kemudian bertanya kepada informan. Berdasarkan jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai banyak dampak positif, termasuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. untuk perlindungan hak asasi manusia. menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. melaksanakan kesejahteraan sosial.

Terakhir sangat perlu untuk mengetahui adakah dampak negative dari hal tersebut dan seberapa seriusnya dampak itu, peneliti kemudian bertanya kepada informan. Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan adanya dampak negatif diterima masyarakat, dapat dikatakan tidak ada karena semua kegiatan yang dilakukan dan kebijakan yang ditetapkan itu diharapkan memberikan dampak yang positif bagi Masyarakat.

Contoh kasus yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan akhir-akhir ini yaitu aksi penolakan tambang pasir besi yang berlokasi di Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh warga sekitar untuk menolak keberadaan tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti yang menyalahi aturan karena tidak mengantongi izin berimbas pada rusaknya lingkungan.

Dengan adanya tindakan

kekerasan dalam proses pembubaran demonstrasi penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma Jadi jelas sekali telah terjadi pelanggaran HAM menurut Pasal 28 Pasal 28 A, Pasal 28 B Pasal 2, Pasal 28 D Pasal 1, Pasal 28 E Pasal 2, Pasal 28 H Pasal 1. ), Hak Asasi Manusia Kabupaten Seluma. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 ayat 1 UUD, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 9 Tahun 1998 1 (1) tentang Kebebasan Berpendapat di Tempat Umum. Oleh karena itu, dalam menangani dan mengamankan demonstrasi massa, polisi mempunyai kewajiban untuk mengikuti prosedur dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mematuhi peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan yang jelas, dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, proses hukum menghindari terjadinya pelanggaran kekerasan yang berlebihan dan sewenang-wenang yang mengakibatkan penangkapan.

Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak yang bersangkutan memahami dan menerapkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, setidaknya hal tersebut bisa di bicarakan dengan musyawarah antar pihak PT, pemerintah dan juga Masyarakat supaya suasana yang tercipta aman dan tentram tanpa ada permusuhan dan selisih paham. Harusnya pihak PT melakukan penambangan sesuai dengan perizinan yang mereka dapatkan tanpa melakukan penyimpangan dan perusakan lingkungan yang membuat Masyarakat setempat resah. Begitupun pemerintah seharusnya

jika wawasan kebangsaan mereka mumpuni maka saat memberikan perizinan untuk pihak PT maka mereka harus memikirkan terlebih dahulu keefesienan dan efektivitas dari aktivitas penambangan pasir besi tersebut.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Dari analisis berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terhadap evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Bengkulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dalam pelaksanaan stabilisasi nasional: Kemudian, evaluasi persatuan dan kesatuan nasional lembaga politik. di provinsi Bengkulu. kebijakan lembaga dalam melaksanakan stabilisasi nasional telah berakhir baik, sesuai dengan indikator-indikator kebijakan publik yang meliputi:

- a. Indikator Input, Dengan kesatuan nasional dan lembaga politik Provinsi Bengkulu sudah terdapat sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang berkualitas mumpuni dalam menjalankan pekerjaan dan tugas, fasilitas yang nyaman dan lengkap agar menciptakan suasana kerja yang baik, peralatan komunikasi seperti komputer dan telepon serta peralatan supaya jaringan internet lancar seperti Wifi, alat-alat tulis kelengkapan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bisa berupa transportasi jika ada tugas di lapangan
- b. Indikator Process, Efektivitas dan efisiensi kebijakan publik

dan politik di provinsi Bengkulu secara terpadu, dapat melalui sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, serta melalui tingkah laku dan prilaku yang menunjukkan kesopanan santunan yang sesuai dengan norma dan agama..

- c. Indikator Outputs, adanya berbagai kegiatan Badan Kesatuan Negara dan Politik Provinsi Bengkulu. dalam menetapkan kebijakan publik, masyarakat dapat damai dan tentram, toleransi, dan harga-menghargai antar etnis/suku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga Masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran tentang pentingnya hidup rukun dan damai, dan toleransi antar umat beragama, hal ini melalui sosialisai.
- d. Indikator Outcomes, ada banyak dampak positif yang diterima Masyarakat, diantaranya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. untuk perlindungan hak asasi manusia. menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. melaksanakan kesejahteraan sosial.

##### **Rekomendasi/Saran**

Tentang Hasil Kajian Persatuan Bangsa dan Peran Badan Politik di Provinsi Bengkulu Dalam Mewujudkan Visi Nasional dan Kewaspadaan Nasional, maka dapat diketahui evaluasi Kebijakan Persatuan nasional dan lembaga

politik Provinsi Bengkulu dalam menjalankan pengaruh nasional terlaksana secara optimal, namun belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar kedepannya dapat bekerja secara maksimal:

- 1) Kebijakan Penyelenggaraan Biro Persatuan Bangsa dan Politik Penguatan Nasional di Provinsi Bengkulu berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, semoga kedepan bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan pemantapan kebangsaan di provinsi Bengkulu.
- 2) Evaluasi Kebijakan Kantor Kesbangpol Provinsi Bengkulu untuk pelaksanaan pemantapan kebangsaan berjalan dengan baik, namun ada yang tetap diperhatikan terkait etos kerja para pegawai dan pemimpin, rasa tanggungjawab dan iniatif, serta rencana masa depan yang harus selalu diprioritaskan dalam menjalankan tugas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alhogbi, B. G., Arbogast, M., Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L., Anthropologie, U. N. E., ... Du, Q. (2018). MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA : Globalisasi sebagai Tantangan dan Pancasila sebagai Imperatif Solusi. *Gender and Development*, 120(1), 0–22.
- Bambang Darmono. (2016). Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 15, Issue 1, pp. 1–42). <https://doi.org/10.22146/jkn.22307>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Dodi, I. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122.
- Firman Gani, D., Maliani, L., & Juliarso, A. (2021). *Strategi Unit Penanganan Konflik Dikabupaten Ciamis Oleh Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis*. 4095–4115.
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Istianto, B. (2011). *Demokratisasi Birokrasi*. Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Graha Ilmu.
- Pratama, M. I., & Najicha, F. U. (2022). Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Setiap Individu Dengan Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Globalisasi Saat ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1403–1409.
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118).